



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023 (AUDITED)



2023

**PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
(099066)
JALAN SULTAN ABDURRAHMAN NO.89
PONTIANAK**

Telp : (0561)- 734100 | Website: pn-pontianak.go.id

PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Pontianak adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Pontianak. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pontianak, 13 Mei 2024
Kuasa Pengguna Anggaran



Yuniar Nelly, S.T.M.M.
NIP. 19770624 200604 2 001

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Pernyataan Tanggung Jawab	III
Ringkasan	1
I Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	3
II Neraca	4
III Laporan Operasional (LO)	5
IV Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	6
V Catatan Atas Laporan Keuangan	7
A Penjelasan Umum	7
B Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	18
C Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	25
D Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional (LO)	33
E Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	36
F Pengungkapan Penting Lainnya	41
IV Lampiran dan Daftar Tabel	
A Daftar Tabel	IV
B Daftar Lampiran	V
C Laporan Barang Pengguna	VI
D Laporan Akumulasi Penyusutan Barang	VII
E Laporan BMN di Neraca	VIII
F Laporan BMN di Neraca (Saldo Awal)	IX
G Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	X
H Rekening Koran	XI
I Berita Acara Opname Fisik Persediaan	XII

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Jalan Sultan Abdurahman N0.89

Telp. (0561)-732100, E-mail : pengadilannegeriptk@gmail.com

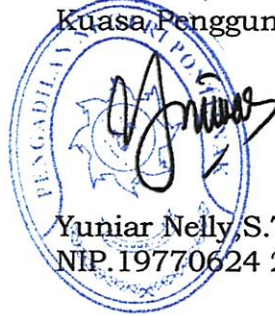
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pontianak yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, 13 Mei 2024

Kuasa Pengguna Anggaran



Yuniar Nelly, S.T.M.M.

NIP. 19770624 200604 2 001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

SATUAN KERJA : (099066) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 13/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 13/05/24 2:48 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	13,714,663,946
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	13,363,920	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	13,363,920
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,816,196,320	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	40,970	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	212,208,288	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	71,788,935	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	40,320,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,707,220,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	503,374,569	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	164,465,820	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	454,310,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	29,810,000	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	237,600,000	0
3.0	511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	2,945,950,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	10,588,800	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,058,880	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	211,820	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1,400,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	869,172	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	2,485,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	814,475,464	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,962,500	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	64,164,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	13,702,500	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	12,974,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	105,000,000	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	2,279,052	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	16,154,500	0
3.0	522141	Belanja Sewa	169,560,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	661,712,820	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	92,400,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	213,538,086	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	113,848,286	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,900,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116,600,000	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	101,600,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	386

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

SATUAN KERJA : (099066) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 13/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 13/05/24 2:48 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	105,450
JUMLAH			13,728,133,702	13,728,133,702

Keterangan :

FINAL

Pontianak, 13 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

null

Yuniar Nelly, ST,MM
197706242006042001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

SATUAN KERJA : (099066) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 2:48 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	29,285,800	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	10,952,900	0
0.0	131111	Tanah	54,166,769,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	5,628,040,966	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	13,877,226,700	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	9,839,869	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4,779,896,611
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	6,708,942,447
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3,114,864	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	3,114,864
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	3,081,000
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	4,526,371
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	13,714,663,946
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	13,363,920	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	58,364,500
0.0	391111	Ekuitas	0	63,277,838,561
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	73,635,315	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	195,265,500
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	16,196,003
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,816,196,320	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	40,584	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	212,208,288	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	71,788,935	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	40,320,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	3,707,220,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	503,374,569	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	164,465,820	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	457,285,550	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	29,810,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	237,600,000	0
3.0	511158	Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	2,945,950,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	10,588,800	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,058,880	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	211,820	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1,400,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	869,172	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	2,485,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	814,475,464	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (099066) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 2:48 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,962,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	64,164,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	13,702,500	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	12,974,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,279,052	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	16,084,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	170,247,500	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	661,712,820	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	92,400,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	213,538,086	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	113,848,286	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,900,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	406,631,370	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,032,121,453	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	55,763,700	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	23,416,500	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	18,750,000	0
3.0	595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	17,815,500	0
JUMLAH			88,761,889,803	88,761,889,803

Keterangan :

FINAL

Pontianak, 13 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Yuniar Nelly, ST,MM
197706242006042001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
 SATUAN KERJA : (099066) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 13/05/24 12:00 PM
 Tgl Cetak : 13/05/24 2:48 PM
 Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	687,500	(687,500)	(100.00)
Persediaan	40,238,700	14,418,900	25,819,800	179.07
JUMLAH ASET LANCAR	40,238,700	15,106,400	25,132,300	166.37
ASET TETAP				
Tanah	54,166,769,000	54,166,769,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	5,628,040,966	5,289,413,966	338,627,000	6.40
Gedung dan Bangunan	13,877,226,700	13,467,553,000	409,673,700	3.04
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	308,073,700	(308,073,700)	(100.00)
Aset Tetap Lainnya	9,839,869	9,839,869	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(11,488,839,058)	(9,971,488,420)	(1,517,350,638)	15.22
JUMLAH ASET TETAP	62,193,037,477	63,270,161,115	(1,077,123,638)	(1.70)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	3,114,864	3,114,864	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(3,114,864)	(3,114,864)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	62,233,276,177	63,285,267,515	(1,051,991,338)	(1.66)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	7,607,371	4,596,871	3,010,500	65.49
Pendapatan Diterima Dimuka	0	2,832,083	(2,832,083)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7,607,371	7,428,954	178,417	2.40
JUMLAH KEWAJIBAN	7,607,371	7,428,954	178,417	2.40
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	62,225,668,806	63,277,838,561	(1,052,169,755)	(1.66)
JUMLAH EKUITAS	62,225,668,806	63,277,838,561	(1,052,169,755)	(1.66)
JUMLAH EKUITAS	62,225,668,806	63,277,838,561	(1,052,169,755)	(1.66)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	62,233,276,177	63,285,267,515	(1,051,991,338)	(1.66)

Keterangan :
 FINAL

Pontianak, 13 Mei 2024
 Penanggung Jawab UAKPA

Yuniar Nelly, ST,MM
 197706242006042001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK 095066

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 2:46 PM
Halaman : 1
lap_irra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah								
I. Pendapatan Perpajakan								
1. Pajak Dalam Negeri								
2. Pajak Perdagangan Internasional								
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	11,640,000	13,363,920	1,723,920	115	9,086,000	21,638,653	12,552,653	238
1. Pendapatan Sumber Daya Alam								
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan								
3. Pendapatan BLU								
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	11,640,000	13,363,920	1,723,920	115	9,086,000	21,638,653	12,552,653	238
III. Pendapatan Hibah								
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	11,640,000	13,363,920	1,723,920	115	9,086,000	21,638,653	12,552,653	238
B. Belanja Negara								
I. Belanja Pemerintah Pusat	14,302,207,000	13,714,663,946	(587,543,054)	96	15,042,895,000	14,975,045,193	(67,849,807)	100
1. Belanja Pegawai	11,766,753,000	11,199,792,738	(566,960,262)	95	12,243,299,000	12,218,667,602	(24,631,398)	100
2. Belanja Barang	2,317,254,000	2,296,671,208	(20,582,792)	99	2,577,596,000	2,534,577,591	(43,018,409)	98
3. Belanja Modal	218,200,000	218,200,000	0	100	222,000,000	221,800,000	(200,000)	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa								
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK 099066

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 2:46 PM
Halaman : 2
lap_ira_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	14,302,207,000	13,714,663,946	(587,543,054)	96	15,042,895,000	14,975,045,193	(67,849,807)	100
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Pontianak, 13 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
null

Yuniar Nelly, ST, MM
197706242006042001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (099066) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 13/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 13/05/24 2:46 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	63,277,838,561	64,174,254,504	(896,415,943)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(14,933,464,466)	(16,120,249,733)	1,186,785,267	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(73,635,315)	0	(73,635,315)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(73,635,315)	0	(73,635,315)	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	13,954,930,026	15,223,833,790	(1,268,903,764)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,052,169,755)	(896,415,943)	(155,753,812)	-
EKUITAS AKHIR	62,225,668,806	63,277,838,561	(1,052,169,755)	-

Keterangan :

FINAL

Pontianak, 13 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA

Yuniar Nelly, ST,MM
197706242006042001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (099066) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 2:45 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	16,196,003	17,477,570	(1,281,567)	(7.333)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	16,196,003	17,477,570	(1,281,567)	(7.333)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	16,196,003	17,477,570	(1,281,567)	(7.333)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	11,202,873,738	12,218,667,602	(1,015,793,864)	(8.313)
Beban Persediaan	55,763,700	33,674,580	22,089,120	65.596
Beban Barang dan Jasa	1,122,639,016	1,479,849,513	(357,210,497)	(24.138)
Beban Pemeliharaan	1,008,882,906	925,981,902	82,901,004	8.953
Beban Perjalanan Dinas	120,748,286	71,099,925	49,648,361	69.829
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (099066) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 2:45 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,438,752,823	1,412,075,281	26,677,542	1.889
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	14,949,660,469	16,141,348,803	(1,191,688,334)	(7.383)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(14,933,464,466)	(16,123,871,233)	1,190,406,767	(7.383)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	3,621,500	(3,621,500)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	3,621,500	(3,621,500)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	3,621,500	(3,621,500)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(14,933,464,466)	(16,120,249,733)	1,186,785,267	(7.362)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(14,933,464,466)	(16,120,249,733)	1,186,785,267	(7.362)

Keterangan :

FINAL

Pontianak, 13 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA

gull



Yuniar Nelly, ST,MM
197706242006042001

**RINCIAN TRANSAKSI ANTAR ENTITAS MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023**

calc_lpe_akun_satker --rekon1

Akun	Uraian	2023	2022
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	13,714,663,946	14,975,045,193
313121	Diterima dari Entitas Lain	-13,363,920	-21,638,653
313221	Transfer Masuk	58,364,500	305,164,750
391131	Pengesahan Hibah Langsung	195,265,500	0
JUMLAH		13,954,930,026	15,258,571,290

**RINCIAN BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023**

calk_lo_akun_satker --rekon17

Akun	Uraian	Jumlah
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	406,631,370
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,032,121,453

JUMLAH	1,438,752,823
--------	---------------

**RINCIAN BEBAN PEMELIHARAAN MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023**

calk_lo_akun_satker--rekon17

Akun	Uraian	Jumlah
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	661,712,820
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	92,400,000
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	213,538,086
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	23,416,500
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	17,815,500

JUMLAH	1,008,882,906
--------	---------------

**RINCIAN BEBAN BARANG OPERASIONAL MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023**

calc_lo_akun_satker --rekon17

Akun	Uraian	Jumlah
521111	Beban Keperluan Perkantoran	814,475,464
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,962,500
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	64,164,000
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	13,702,500
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	12,974,000
522112	Beban Langganan Telepon	2,279,052
522113	Beban Langganan Air	16,084,000
522141	Beban Sewa	170,247,500
595112	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	18,750,000

JUMLAH	1,122,639,016
--------	---------------

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2023 (Audited) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp13.363.920 atau mencapai 115 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp11.640.000.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp13.714.663.946 atau mencapai 96 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp14.302.207.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp62.233.276.177 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp40.238.700; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp62.193.037.477; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp7.607.371 dan Rp62.225.668.806.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/ defisit dari operasi, surplus/ defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/ defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/ defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode

sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp16.196.003 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp14.949.660.469 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp14.933.464.466, Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan sebesar Rp0 sehingga Entitas mengalami Defisit-LO Rp14.933.464.466.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp63.277.838 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp14.933.464.466 ditambah dengan koreksi-koreksi yang mengurangi nilai ekuitas senilai Rp73.635.315 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp13.954.930.026 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp62.225.668.806.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai pada 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

URAIAN	CAT.	TAHUN 2023				TAHUN 2022
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DIATAS (DI BAWAH)	%	REALISASI
Pendapatan	B.1					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	11.640.000	13.363.920	1.723.920	115	21.638.653
Jumlah Pendapatan		11.640.000	13.363.920	1.723.920	115	21.638.653
Belanja	B.2					
Belanja Pegawai	B.3	11.766.753.000	11.199.792.738	566.960.262	95	12.218.667.602
Belanja Barang	B.4	2.317.254.000	2.296.671.208	20.582.792	99	2.534.577.591
Belanja Modal	B.5	218.200.000	218.200.000	0	100	221.800.000
Jumlah Belanja		14.302.207.000	13.714.663.946	587.543.054	96	14.975.045.193

II. NERACA

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
NERACA
PER 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	CAT.	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di BendaharaPengeluaran	C.1.1	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.2	0	687.500
Persediaan	C.1.3	40.238.700	14.418.900
JUMLAH ASET LANCAR		40.238.700	14.418.900
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	54.166.769.000	54.166.769.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	5.628.040.966	5.289.413.966
Gedung dan Bangunan	C.2.3	13.877.226.700	13.467.553.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	0	308.073.700
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	9.839.869	9.839.869
Akumulasi Penyusutan	C.2.6	(11.488.839.058)	(9.971.488.420)
JUMLAH ASET TETAP		62.193.037.477	63.270.161.115
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Lain Lain	C.3.1	3.114.864	3.114.864
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2	(3.114.864)	(3.114.864)
JUMLAH ASET LAINNYA		0	0
JUMLAH ASET		62.233.276.177	63.285.267.515
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1	7.607.371	4.596.871
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.2	0	2.832.083
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		7.607.371	7.428.954
JUMLAH KEWAJIBAN		7.607.371	7.428.954
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	62.225.668.806	63.277.838.561
JUMLAH EKUITAS		62.225.668.806	63.277.838.561
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		62.233.276.177	63.285.267.515

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	CAT.	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	16.196.003	17.477.570
JUMLAH PENDAPATAN		16.196.003	17.477.570
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	11.202.873.738	12.218.667.602
Beban Persediaan	D.3	55.763.700	33.674.580
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.122.639.016	1.479.849.513
Beban Pemeliharaan	D.5	1.008.882.906	925.981.902
Beban Perjalanan Dinas	D.6	120.748.286	71.099.925
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.438.752.823	1.412.075.281
JUMLAH BEBAN		14.949.660.469	16.141.348.803
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(14.933.464.466)	(16.123.871.233)
KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8	0	3.621.500
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(14.933.464.466)	(16.123.871.233)
POS LUAR BIASA	D.9	0	0
Beban Pos Luar Biasa		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) LO		(14.933.464.466)	(16.123.871.233)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 31 Desember
2022**

(dalam rupiah)

URAIAN	CAT.	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	63.277.838.561	64.174.254.504
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(14.933.464.466)	(16.120.249.733)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(73.635.315)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	13.954.930.026	15.223.833.790
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(1.052.169.755)	(896.415.943)
EKUITAS AKHIR	E.6	62.225.668.806	63.277.838.561

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pengadilan Negeri Pontianak

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Visi Pengadilan Negeri Pontianak pada Tahun 2023 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja.

Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Pontianak pada tahun 2020 sampai dengan 2024 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Negeri Pontianak. Visi Mahkamah Agung adalah Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, di mana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung RI :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian visi dan misi Mahkamah Agung RI tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Negeri Pontianak sebagai visi dan misinya.

Visi Pengadilan Negeri Pontianak adalah: "Terwujudnya Pengadilan Negeri Pontianak Yang Agung"

Misi Pengadilan Negeri Pontianak adalah:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pontianak.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pontianak.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Pontianak.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Pontianak melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan strategi peningkatan kinerja yaitu:

Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.

Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.

Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan.

Mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.

Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.

Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Negeri Pontianak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian procedural manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian/Lembaga.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Kantor Kantor Pengadilan Negeri Pontianak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Negeri Pontianak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/ penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Negeri Pontianak. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Pontianak adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan (LRA)

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/ atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perhendaharaan Negara (KPPN), Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Peyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan

1. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
2. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan,

dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap :

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 Tahun
Franchise	5 Tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 Tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 Tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 Tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Kantor Pengadilan Negeri Pontianak memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.302.207.000. Selama tahun 2023, dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Kantor Pengadilan Negeri Pontianak yang disebabkan adanya Revisi Halaman III Terkait Proyeksi rencana penarikan dana Triwulanan yang telah dilakukan sebanyak 9 (Sembilan) kali. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I
Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNB	11.640.000	11.640.000
Jumlah Pendapatan	11.640.000	11.640.000
Belanja		
Belanja Pegawai	12.243.299.000	11.766.753.000
Belanja Barang	2.336.694.000	2.317.254.000
Belanja Modal	0	218.200.000
Jumlah Belanja	14.579.993.000	14.302.207.000

Catatan :

1. Pengadilan Negeri Pontianak selama Tahun 2023 telah melakukan revisi perubahan DIPA sebanyak 9 Kali
2. Revisi dilakukan dalam hal proyeksi rencana penarikan dana Triwulan I sampai dengan Tahunan 2023.
3. Revisi dalam hal pergeseran detail terkait minus dalam belanja pegawai serta pergeseran untuk optimalisasi anggaran.

Pendapatan
Rp13.363.920

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.363.920. Pengadilan Negeri Pontianak memperoleh pendapatan dari sewa rumah dinas.

Realisasi
Belanja
Rp13.714.663.946.
46.

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp13.714.663.946 atau 96% dari anggaran belanja sebesar Rp14.302.207.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	11.766.753.000	11.199.792.738	95
Belanja Barang	2.317.254.000	2.296.671.208	99
Belanja Modal	218.200.000	218.200.000	100
Total Belanja Kotor	14.302.207.000	13.714.663.946	96
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0
Jumlah	14.302.207.000	13.714.663.946	96

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Penurunan realisasi Belanja Modal yang direalisasikan untuk Pengadaan Fasilitas Perkantoran dan Renovasi Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pontianak yang telah selesai pada Semester II yang merupakan Anggaran tambahan (ABT) pada tahun 2023.
2. Penurunan realisasi Belanja Pegawai dikarenakan adanya mutasi dan promosi pegawai Pengadilan Negeri Pontianak ke satker lainnya.

3. Serta peningkatan/percepatan belanja operasional telah sesuai target yang ditetapkan.

Tabel III
Perbandingan Realisasi Belanja
Tahun 2023 dan Tahun 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Belanja Pegawai	11.199.792.738	12.218.667.602
Belanja Barang	2.296.671.208	2.534.577.591
Belanja Modal	218.200.000	221.800.000
Jumlah Belanja	13.714.663.946	14.975.045.193

Menurunnya realisasi belanja terjadi di belanja pegawai, belanja barang serta belanja modal.

B.2. Belanja Pegawai

Belanja
Pegawai
Rp11.199.3792.
738

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11.199.79738 dan Rp12.218.667.602. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 5 persen dari . Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Perubahan jumlah PNS pada tahun 2023 yang mengalami penurunan karena promosi dan mutasi maupun pensiun.
2. Perubahan jumlah Hakim Ad Hoc yang mengalami penurunan karena promosi dan mutasi maupun pensiun.

Tabel IV
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Tahun 2023 dan Tahun 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	11.183.284.902	12.218.667.602	8.47
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	16.613.672	0	0
Jumlah Belanja Kotor	11.199.898.574	12.218.667.602	8.47
Pengembalian Belanja Pegawai	105.836	0	0
Jumlah Belanja	11.199.792.738	12.218.667.602	8.47

B.4. Belanja Barang

Belanja Barang
Rp.2.296.671.208

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.296.671.208 dan Rp2.534.577.591. Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 mengalami penurunan 9.38 persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun 2022. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Penurunan Belanja Barang Operasional dalam sub kelompok akun 5211, seperti Belanja keperluan perkantoran turun signifikan sebesar 6.82 persen yang disebabkan tidak adanya pagu Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19;
2. Penurunan Belanja Jasa sub kelompok akun 5221, yang disebabkan tidak adanya pagu belanja Labgganan Listrik di Tahun 2023 yang pembayarannya sudah langsung melalui Unit Eselon 1 Badan Urusan Administrasi, serta terdapat penurunan pada jenis Jasa yang lainnya, berupa belanja Sewa Rumah Dinas Hakim yang mengalami penurunan di Tahun 2023 yang dikarenakan berkurangnya jumlah Hakim yang

menggunakan sewa rumah Hakim. Total penurunan sebesar 64.55 persen dari tahun sebelumnya;

3. Belanja Pemeliharaan sub kelompok akun 5231 , terjadi kenaikan pada pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor sebesar 6.78 persen dan peralatan dan mesin dikarenakan tingkat kerusakan Gedung dan Bangunan , dan peralatan dan mesin yang meningkat pada tahun 2023 ini;
4. Tidak adanya belanja barang dan jasa penanganan pandemic Covid-19 di bandingkan tahun sebelumnya.

Tabel V
Perbandingan Belanja Barang
Tahun 2023 dan Tahun 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	%
Belanja Barang Operasional	902.304.464	968.312.488	(6.82)
Belanja Barang Non Operasional	12.974.000	8.550.000	51.74
Belanja Barang Persediaan	105.000.000	50.159.930	109.33
Belanja Jasa	187.993.552	530.277.346	(64.55)
Belanja Pemeliharaan	967.650.906	906.177.902	6.78
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	120.748.286	71.099.925	69.83
Jumlah Kotor	2.296.671.208	2.534.577.591	(9.39)
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah Belanja	2.296.671.208	2.534.577.591	(9.39)

B.5. Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp218.20.000*

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp218.200.000 dan Rp221.800.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya

yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1.62 persen dibandingkan Tahun 2022 disebabkan karena adanya penurunan pada Belanja Modal tahun 2023 yang merupakan Anggaran Revisi pada Semester 2 tahun 2023;

Berikut rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2023 dan Tahun 2022:

Tabel VI
Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Modal
Tahun 2023 dan Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.600.000	192.000.000	(39.27)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	101.600.000	29.800.000	240.94
Jumlah Kotor	218.600.000	221.800.000	(1.44)
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah Belanja	218.600.000	221.800.000	(1.44)

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp116.600.000

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 adalah sebesar Rp116.600.000 mengalami penurunan sebesar 39.27 persen bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp192.000.000. Hal ini disebabkan oleh pagu belanja Modal Peralatan dan Mesin yang mengalami penurunan pada tahun ini. Adapun perbandingan penambahan tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	%
Printer	0	10.000.000	0
Laptop	0	162.000.000	0
Sarana Disabilitas	0	20.000.000	0
Sepeda Motor	0	0	0
Personal Computer (PC)	0	0	0
Meubelair	116.600.000	0	0
Jumlah Belanja	116.600.000	192.000.000	39.27

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp101.600.000*

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah Gedung dan masing-masing sebesar Rp101.600.000 dan Rp29.800.000 Belanja Modal tersebut merupakan penambahan nilai Gedung dan Bangunan berupa pemasangan tracktile (prasarana penyanggah disabilitas). Berikut rincian belanja modal gedung dan bangunan pada Tahun 2023 dan Tahun 2022:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	101.600.000	29.800.000	240.93
Jumlah Belanja	101.600.000	29.800.000	240.93

Catatan : kontrak belanja modal gedung dan bangunan Pengadilan Negeri Pontianak menggunakan jenis kontrak tahun tunggal, sehingga belanja modal tersebut dilakukan mulai hanya di tahun 2023, dimana kontrak sudah selesai pada Semester 1 begitu juga untuk tahap pemeliharannya.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp40.238.700

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Kantor Pengadilan Negeri Pontianak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp40.238.700 dan Rp15.106.400. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pengadilan Negeri Pontianak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas Tunai	0	0
Kas Bank di Bank BRI No. Rek. 65324401961100	0	0
Kuitansi di Bendahara	0	0
Jumlah	0	0

C.1.2. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Belanja Dibayar
Dimuka
(prepaid) Rp0

Belanja Dibayar Dimuka adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan tetapi memanfaatkannya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut. Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) pada Kantor Pengadilan Negeri Pontianak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp687.500, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Belanja Langganan Web Hosting	0	687.500
Jumlah	0	687.500

C.1.3. Persediaan

Persediaan
Rp40.238.700

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp40.238.700 dan Rp14.418.900 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel VII

Rincian Perbandingan Persediaan

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2023	Tahun 2022	%
Barang Konsumsi	105.000.000	50.159.930	109.33
Barang Untuk Pemeliharaan	0	0	0
Jumlah	18.425.000	9.970.000	84.80

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap
Rp62.193.037.4
77

Saldo Aset Tetap Kantor Pengadilan Negeri Pontianak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp62.193.037.477 dan Rp63.270.161.115. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Aset Tetap pada Kantor Pengadilan Negeri Pontianak berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, dan Aset Tetap Lainnya.

C.2.1. Tanah

Tanah
Rp54.166.769.000

Tanah yang di miliki Kantor Pengadilan Negeri Pontianak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp54.166.769.000 dan Rp54.166.769.000.

Mutasi Aset Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel VIII
Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Perolehan 31 Desember 2022	54.166.769.000
Mutasi Tambah :	
Pembelian	0
Mutasi Kurang	
Revaluasi Aset	0
Penghapusan	0
Saldo per 31 Desember 2023	54.166.769.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	54.166.769.000

Tabel IX
Rincian Tanah Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	879 m2	Jalan Untung Suropati	5.408.048.000
2	2.082 m2	Jalan Sudimoro	8.135.902.000
3	806 m2	Jalan Alianyang GG. Kurnia	1.128.248.000
4	220 m2	Jalan Gusti Hamzah	717.970.000
5	1.990 m2	Jalan Sulawesi	8.167.504.000
6	2.887 m2	Jalan Sultan Abdurrahman	23.480.670.000
7	1.266	Jalan Uray Bawadi	7.128.427.000
Jumlah			54.166.769.000

Tanah seluas tersebut merupakan tanah yang digunakan untuk gedung kantor dan rumah dinas Pengadilan Negeri Pontianak.

Rincian Tanah beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp5.469.340.966
6

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kantor Pengadilan Negeri Pontianak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp5.628.040.966 dan Rp5.289.413.966.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel X
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Perolehan 31 Desember 2022	5.289.3413.966
Mutasi Tambah :	
Pembelian	116.600.000
Transfer Masuk	63.327.000
Hibah	158.700.000
Koreksi Tambah	0
Mutasi Kurang	
Penghentian Aset dari Penggunaan	0
Saldo per 31 Desember 2023	5.469.340.966
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(4.763.901.611)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	705.439.355

Mutasi tambah peralatan dan mesin antara lain adalah sebagai berikut :

Transfer Masuk Peralatan TIK berupa Komputer Unit (1 unit) senilai Rp14.792.000,Scanner (2 unit) senilai Rp37.000.000, Scanner (1 unit) senilai Rp5.742.000 dan Printer (1 unit) senilai Rp3.093.000 dari Eselon I, hibah pelaran dan mesin senilai 158.700.000,-

Rincian Peralatan dan Mesin beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Gedung dan
Bangunan
Rp13.877.226.700

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan merupakan aset tetap. Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah

masing-masing sebesar Rp13.877.226.700 dan Rp13.467.553.000 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel XI
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

Saldo Perolehan 31 Desember 2022	13.467.553.000
Mutasi Tambah :	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	101.600.000
Reklas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	308.073.700
Mutasi Kurang	
-	0
Saldo per 31 Desember 2023	13.877.226.700
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(6.708.942.447)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	7.168.284.253

Terdapat penambahan nilai Gedung dan Bangunan pada Tahun 2023 dibandingkan Tahun ini dikarenakan adanya Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Renovasi Lahan Parkir dan Proses Reklas Jalan, Irigasi dan Bangunan di Tahun 2022 yang disarankan oleh unit eselon 1 untuk dipindahkan ke dalam Klasifikasi Gedung dan Bangunan.

Rincian Gedung dan Bangunan beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rp0*

Jalan, Irigasi, dan Jaringan merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp308.073.700 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel XI
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

(dalam rupiah)

Saldo Perolehan 31 Desember 2022	308.073.700
Mutasi Tambah :	
-	
Mutasi Kurang	
Reklas ke Klasifikasi Gedung dan Bangunan	308.073.700
Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	0

Terdapat pengurangan jenis aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun ini karena adanya Reklasifikasi ke dalam Kelompok Aset Gedung dan Bangunan..

Rincian Jalan, Irigasi , dan Jaringan beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp3.114.864*

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 34 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp3.114.864 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel XI
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Saldo Perolehan 31 Desember 2022	3.114.864
Mutasi Tambah :	
-	
Mutasi Kurang	
-	0
Saldo per 31 Desember 2023	3.114.864
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	3.114.864
Nilai Buku per 31 Desember 2023	0

Tidak terdapat penambahan maupun pengurangan jenis aset tetap lainnya pada tahun ini.

Rincian Aset Tetap Lainnya beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

C.2.5. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi
Penyusutan
Rp11.472.844.0
58

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11.488.839.058 dan Rp9.971.488.420. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023:

Tabel XII
Rincian Akumulasi Penyusutan

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	AKM. Peyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	54.166.769.000	0	54.166.769.000
2	Peralatan dan Mesin	5.628.040.966	(4.763.901.611)	705.439.355
3	Gedung dan Bangunan	13.877.226.700	(6.708.942.447)	7.168.284.263
4	Jalan, Irigasi, dan Bangunan	0	0	0
5	Aset tetap Lainnya	9.839.869	0	9.839.869
Jumlah		73.523.176.535	11.472.844.058	62.050.332.477

Rincian akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

C.3. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek
Rp7.607.371*

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Kantor Pengadilan Negeri Pontianak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp7.607.371 dan Rp7.428.954.

C.3.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

*Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp7.607.371*

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp7.607.371 dan Rp4.596.871. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Kantor Pengadilan Negeri Pontianak per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel XIII
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2023
(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	3.081.000
2	Belanja Barang yang Masih Harus dibayar	4.526.371
Jumlah		7.607.371

Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan Belanja Pegawai yang masih harus dibayarkan dan Belanja Barang yang masih harus dibayarkan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai berupa Uang Makan PNS bulan Desember 2023 yang di ajukan pada bulan Januari 2024;
2. Belanja Barang berupa Tagihan Air, Telpon, Internet yang merupakan merupakan pemakaian bulan Desember 2023 yang dibatarkan pada bulan Januari 2024.

Utang Yang
Belum
Ditagihkan Rp0

C.3.2. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan merupakan utang akrual saat Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pihak ketiga. Pengakuan hutang ini dicatat oleh Satker dengan dokumen sumber BAST/Surat Penagihan/kuitansi UP yang belum di SPM kan. Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Adapun rincian utang yang belum ditagihkan adalah sebagai berikut:

Tabel XIV
Rincian Utang yang belum ditagihkan Tahun 2023
(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kuitansi UP yang belum di SPMkan	0
Jumlah		0

Kuitansi UP yang belum di SPMkan merupakan bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan kepada KPPN yang dicatat sebagai pengeluaran kas oleh Bendahara Pengeluaran serta tercatat sebagai pengeluaran akrual oleh Neraca.

C.3.3. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN Rp0

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Adapun rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut:

Tabel XV

Rincian Uang Muka dari KPPN TA 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Uang Persediaan (UP)	0
2	Tambahan Uang Persediaan (TUP)	0
Jumlah		0

C.4. Ekuitas

Ekuitas
Rp62.225.668.806

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp62.225.668.806 dan Rp63.277.838.561. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
Negara Bukan
Pajak
Rp16.196.003

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp16.196.003 dan Rp17.477.570.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp11.202.873.7
38

Jumlah Beban Pegawai pada per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11.202.873.738 dan Rp12.218.667.602. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Adapun rincian Beban pegawai per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel XVI
Rincian Perbandingan Beban Pegawai
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	%
Beban Gaji Pokok	2.816.196.320	2.886.227.420	(2.42)
Pengem. Beban Pembulatan	(386)	(476)	(18.90)
Beban Pembulatan	40.970	42.464	(3.51)
Beban Tunj. Suami/Istri	212.208.288	218.694.880	(2.96)
Beban Tunj. Anak	71.788.935	72.695.423	(1.24)
Beban Tunj. Struktural	40.320.000	40.320.000	0
Beban Tunj. Fungsional	3.707.220.000	4.171.700.000	(11.13)
Beban Tunj. PPh	503.374.569	558.142.211	(9.81)
Beban Tunj. Beras	164.465.820	165.769.380	(0.78)
Beban Uang Makan	457.391.000	488.096.000	(6.29)
Pengem. Beban Uang Makan PNS	(105.450)	(978.950)	(89.22)

Beban Tunj. Umum	29.810.000	26.335.000	13.19
Pengem. Beban Tunj. Umum	0	2.775.750	0
Beban Tunj. Kemahalan Hakim	237.600.000	279.450.000	(14.97)
Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	2.945.950.000	3.314.950.000	(11.13)
Beban Gaji Pokok PPPK	10588.800	0	0
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.058.880	0	0
Beban Tunjangan Anak PPPK	211.820	0	0
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1.400.000	0	0
Beban Tunjangan Beras PPPK	869.172	0	0
Beban Uang Makan PPPK	2.485.000	0	0
Jumlah Beban	11.202.873.738	12.218.667.602	(8.31)

Penurunan Beban Pegawai sesuai rincian perbandingan diatas terdapat pada sebagian besar beban tunjangan, antara lain Beban Tunjangan Gaji Pokok, Beban Tunjangan Struktural, Tunjangan Fungsional, Tunjangan PPH dan Tunjangan Kemahalan Hakim, dan lainnya. Hal ini disebabkan oleh :

1. Adanya Mutasi/Pindah Hakim sehingga terjadi kekosongan jabatan tersebut;

D.3. Beban Persediaan

Beban
Persediaan
Rp55.763.700

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp55.763.700 dan 33.674.580. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel XVII
Rincian Perbandingan Beban Persediaan
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	%
Beban Persediaan Konsumsi	55.763.700	33.674.580	65.59
Jumlah Beban	55.763.700	33.674.580	65.59

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp1.1122.639.0
16*

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.122.639.016 dan Rp1.479.849.513. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Berikut rincian perbandingan beban barang dan jasa per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 :

Tabel XVIII
Rincian Perbandingan Beban Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	%
Beban Keperluan Perkantoran	814.475.464	753.885.448	8.03
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.962.500	4.157.800	139.61
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	64.164.000	40.680.000	57.72
Beban Barang Operasional Lainnya	13.702.500	116.972.050	(88.28)
Beban Peralatan dan Mesin-Ekstrakomptabel	12.974.000	0	0

Beban Barang Operasional- Pandemi Covid-19	0	52.641.140	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	8.550.000	0
Beban Langganan Listrik	0	279.094.045	0
Beban Langganan Telepon	2.279.052	2.275.630	0.15
Beban Langganan Air	16.084.000	14.325.900	12.27
Beban Sewa	170.247.500	206.672.500	17.62
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	18.750.000	595.000	0
Jumlah Beban	1.122.639.016	1.479.849.513	(25.40)

Penurunan Beban barang dan Jasa di hampir terjadi di seluruh rincian, dikarenakan sebagai berikut :

1. Turunnya Beban Barang Maupun Jasa Penanganan Pandemi Covid-19 terjadi dikarenakan pada tidak ada lagi Beban tersebut pada Tahun ini;
2. Turunnya Beban Barang Non Operasional lainnya disebabkan oleh karena perpindahan dimana sebelumnya belanja keperluan sehari-hari kantor lainnya berpindah kedalam akun detail Beban Keperluan Perkantoran;
3. Turunnya Beban Barang Maupun Jasa Langganan Listrik terjadi dikarenakan tagihan Listrik satker telah diambil alih oleh Eselon 1 sehingga tidak ada lagi Beban tersebut pada Tahun ini;

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp991.067.406

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.008.882.906 dan Rp925.981.902. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel IXX
Rincian Perbandingan Pemeliharaan
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	661.712.820	595.154.400	11.18
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	92.400.000	110.038.922	(16.03)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	213.538.086	200.984.580	6.25
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	23.416.500	19.804.000	18.24
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	17.815.500	0	0
Jumlah Beban	1.008.882.906	925.981.902	7.03

Kenaikan Beban Pemeliharaan sebabkan karena bertambahnya kegiatan pemeliharaan yang dilakukan pada tahun ini, begitu juga Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin naik diakibatkan meningkatnya frekuensi penggunaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan peralatan mesin TIK sudah 4 (empat) tahun dalam penggunaan sehingga memerlukan pemeliharaan lebih tinggi dari sebelumnya.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp120.748.286

Behan Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp120.748.286 dan Rp71.099.925. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh kenaikan frekuensi rapat koordinasi secara offline dan adanya pelatihan dari Tingkat Banding yang perjalanan dinasnya ditanggung sendiri. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel XX
Rincian Perbandingan Perjalanan Dinas
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	113.848.286	62.999.925	170.71
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.900.000	8.100.000	(14.81)
Jumlah Beban	120.748.286	71.099.925	69.83

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp1.438.752.823
3

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.438.752.823 dan Rp1.412.075.271. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel XXI
Rincian Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	%
Beban Penyusutan Peralatan dan mesin	406.631.370	397.868.419	(1.82)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.032.121.453	1.005.892.504	2.61
Beban Penyusutan Irigasi	0	1.629.334	0
Beban Penyusutan Jaringan	0	6.685.024	0
Jumlah Penyusutan	1.438.752.823	1.412.075.281	0.75

-	-	-	-
Jumlah Amortisasi	0	0	0
Jumlah Beban	1.438.752.823	1.412.075.281	0.75

D.8. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non
Operasional Rp0

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel XXII
Rincian Perbandingan Kegiatan Non Operasional
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	%
Kegiatan Non Operasional	0	0	0
Jumla	0	0	0

D.9. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa
Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari pos luar biasa untuk periode per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp63.277.838.5
61

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 masing-masing adalah sebesar Rp63.277.838.561 dan Rp64.174.254.504.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Defisit-LO
Rp14.933.464.4
66

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah defisit sebesar Rp14.933.464.466 dan Rp16.120.249.733.

Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi Rp0

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0.

E.4. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang
menambah/men
urangi ekuitas
Rp0

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset yang mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp73.635.315 dan Rp0.

E.5. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp13.954.930.0
26

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp13.954.930.026 dan Rp15.223.833.790.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel XXIII

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	13.714.663.946
Diterima Dari Entitas Lain	(13.363.920)
Transfer Masuk	58.364.500
Pengesahan Hibah Langsung	195.265.500
Jumlah	13.954.930.026

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp13.363.920 sedangkan DKEL sebesar Rp13.714.663.946.

E.5.2. Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp58.364.500 terdiri dari:

Tabel XXIV

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Peralatan dan Mesin	Biro Umum MA RI	58.364.500
Jumlah		58.364.500

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp195.265.500

E.6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp62.225.668.8
06

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp62.255.668.806 dan Rp63.277.838.561.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadia Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca

F.2 Pengungkapan Lain-lain

Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor: 55/SK/XII/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya Tahun Anggaran 2023 jo Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Prngguna Barang Nomor: W17-U1/57/KU.03/1/2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Pengadilan Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2023, tidak terdapat perubahan hingga akhir Tahun 2023.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MODUL PENERIMAAN NEGARA

Treasury Billing System
10-01-2024 08:59:19

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data Pembayaran Tagihan

Kode Billing	702312290351260	Pembuat Billing	RATNA MARHAMAH HARAHAP, SH	NTPN	131130JUNV98CU4S
Tanggal Billing	29-12-2023 11:55:24	Kementerian/ Lembaga	005 - MAHKAMAH AGUNG	NTB	2312290438822
Tanggal Kadaluwarsa	05-01-2024 11:55:24	Unit Eselon I	01 - BADAN URUSAN ADMINISTRASI	Tanggal Bayar	29-12-2023 14:02:23
Status	Sudah dibayar	Satuan Kerja	099066 - PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	Bank/ Pos Bayar	BANK RAKYAT INDONESIA

Keterangan

Pengembalian Sisa TUP TA 2023

Detail Pembayaran Tagihan

Wajib Bayar	Uraian	Akum	Jumlah Setoran
Bendahara	Kab/ Kota KOTA PONTIANAK	815511	35.377.626,00
NPWP 001136353701000	Periode DESEMBER 2023		

Total Disetor

IDR 35.377.626,00

(Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tjutih Puluh Tjutih Ribu Enam Ratus Dua
Puluh Enam Rupiah)

Keterangan Pembayaran Tagihan

1. Nomor Transaksi Perencanaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan setelah masa kadaluwarsa. Jika masa kadaluwarsa telah tercapai, billing ini akan berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran akan diterima kas negara dan akan masuk ke rekening bank negara.
4. Pembayaran akan diterima kas negara dan akan masuk ke rekening bank negara.
5. Pembayaran pengembalian sisa tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan B. Ang. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti internet banking, phone banking, dan lain-lain yang tertera pada faktur pajak.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan yang tertera dalam dokumen faktur pajak.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau meneliti data, hubungi call center 167 atau kunjungi <https://na.kemkeu.go.id/>.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MODUL PENERIMAAN NEGARA

Treasury Billing System
10-01-2024 08:59:19

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data Pembayaran Tagihan

Kode Billing	702312290351260	Pembuat Billing	RATNA MARHAMAH HARAHAP, SH	NTPN	131130JUNV99CU4S
Tanggal Billing	29-12-2023 11:55:24	Kementerian / Lembaga	005 - MAHKAMAH AGUNG	NTB	231229438822
Tanggal Kadaluwarsa	05-01-2024 11:55:24	Unit Eselon I	01 - BADAN URUSAN ADMINISTRASI	Tanggal Bayar	29-12-2023 14:02:23
Status	Sudah Dibayar	Satuan Kerja	090066 - PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	Bank/ Pos Bayar	BANK RAKYAT INDONESIA
Keterangan	Pengembalian Sisa TUP TA 2023			Kanal Bayar	7012 - Teller

Detail Pembayaran Tagihan

Wajib Bayar		Uraian		Akun		Jumlah Setoran
Bendahara	NPWP 001138353701000	Kab/ Kota KOTA PONTIANAK		815511		35.377.626,00
		Periode DESEMBER 2023				

Total Disetor

IDR 35.377.626,00

(Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah)

Keterangan Pembayaran Tagihan

- Nomer Transaksi Pemerintah Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.
- Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluwarsa. Jika masa kadaluwarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
- Pembayaran uang jaminan kaselahan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- Pembayaran atas lunas dana persisa dan ibungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- Pembayaran pengembalian biaya pinjaman menggunakan Billing Pemerintah Indonesia. Sedangkan pembayaran pengembalian biaya pinjaman menggunakan Billing.
- Cara pembayaran dapat melalui berbagai media: bank, pembayaran seperti loket bayar bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh rekening agent.
- Pada saat ini bila ada data pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang telah tercantum bahwa Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakakuratan data, lalu apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
- Anda akan menerima gangguan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center (toll-free) di 14260 dan juga dapat melalui <https://tka.kemtan.go.id/>.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5759865, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)
BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK (099066)
Rekening Induk : RKK BUA MA OPS (032901xxxxxx304)
Virtual Account : 653240990661000 | BPG 042 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
Periode : 01-12-2023 s/d 31-12-2023

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-05	09:09:00	22179991	BPG 042 PENGADILAN NEGR I PTK	59.568.300,00	59.568.300,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2023-12-06	10:08:21	22354440	Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupiah Mumi Satker Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2023 untuk230421301024938000001	0,00	0,00	191.953.200,00	191.953.200,00	SPAN	
2023-12-08	12:51:12	22773066	Pengantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 230421301025484000001	191.953.200,00	0,00	31.899.730,00	223.852.930,00	SPAN	
2023-12-14	09:15:55	23409727	Pengantian Uang Persediaan KKP Untuk Keperluan Belanja Barang 230421301026451000001	223.852.930,00	0,00	1.882.350,00	225.735.280,00	SPAN	
2023-12-14	14:11:53	23467478	REGULAR_65324_0990661000	225.735.280,00	223.852.930,00	0,00	1.882.350,00	TELLER_CARD	
2023-12-14	14:26:30	23470256	Bayar Kartu Kredit BRI BRI BRI NON FEE5534790300497104	1.882.350,00	1.882.350,00	0,00	0,00	ATM	
2023-12-18	15:07:49	24043198	653240990661000	0,00	0,00	19.620.000,00	19.620.000,00	BRIVA	
2023-12-19	10:20:52	24214779	Pengantian Uang Persediaan KKP Untuk Keperluan Belanja Barang 230421301026756000001	19.620.000,00	0,00	1.580.564,00	21.200.564,00	SPAN	
2023-12-19	14:26:33	24276703	REGULAR_65324_0990661000	21.200.564,00	19.620.000,00	0,00	1.580.564,00	TELLER_CARD	
2023-12-29	06:27:41	27428149	Bayar Kartu Kredit BRI BRI BRI NON FEE5534790300497104	1.580.564,00	1.580.564,00	0,00	0,00	ATM	
Total Mutasi					306.504.144,00	246.935.844,00			
Saldo Akhir							0,00		

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

UAPB : 005
UAKPB : 099066

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 05/02/24 2:35 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023			MUTASI			BERKURANG			SALDO PER 31 DESEMBER 2023		
			KUANTITAS	NILAI		KUANTITAS	NILAI		KUANTITAS	NILAI		KUANTITAS	NILAI	
1	2	3	4	5		6	7		8	9		10	11	
131111	Tanah		10,130	54,166,769,000		2,888	9,264,150,000		2,888	9,264,150,000		10,130	54,166,769,000	
20101	TANAH PERSIL	-	10,130	54,166,769,000		2,888	9,264,150,000		2,888	9,264,150,000		10,130	54,166,769,000	
132111	Peralatan dan Mesin		1,078	5,330,768,132		35	233,462,652		6	40,561,652		1,107	5,523,669,132	
30103	ALAT BANTU	-	2	267,663,000		0	0		0	0		2	267,663,000	
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	9	1,230,343,941		0	0		0	0		9	1,230,343,941	
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	4	2,860,000		0	0		4	2,860,000		0	0	
30303	ALAT UKUR	-	1	17,701,652		0	0		1	17,701,652		0	0	
30501	ALAT KANTOR	-	172	470,307,688		1	20,000,000		0	0		173	490,307,688	
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	652	1,498,294,895		28	132,434,000		0	0		680	1,630,728,895	
30601	ALAT STUDIO	-	48	275,358,820		0	0		0	0		48	275,358,820	
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	23	56,676,100		0	0		0	0		23	56,676,100	
31001	KOMPUTER UNIT	-	95	1,241,458,036		1	14,792,000		0	0		96	1,256,250,036	
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	71	250,104,000		5	66,236,652		0	0		76	316,340,652	
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	-	1	20,000,000		0	0		1	20,000,000		0	0	
133111	Gedung dan Bangunan		18	13,467,653,000		13	1,996,458,700		13	1,586,785,000		18	13,877,226,700	
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	5	11,880,768,000		0	409,673,700		0	0		5	12,290,441,700	
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	13	1,586,785,000		13	1,586,785,000		13	1,586,785,000		13	1,586,785,000	
134112	Irigasi		1	58,656,000		0	0		1	58,656,000		0	0	
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	-	1	58,656,000		0	0		1	58,656,000		0	0	
134113	Jaringan		2	249,417,700		0	0		2	249,417,700		0	0	
50402	JARINGAN LISTRIK	-	1	244,417,700		0	0		1	244,417,700		0	0	
50403	JARINGAN TELEPON	-	1	5,000,000		0	0		1	5,000,000		0	0	
135121	Aset Tetap Lainnya		30	9,839,869		0	0		0	0		30	9,839,869	
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	30	9,839,869		0	0		0	0		30	9,839,869	
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-	22	3,679,973		0	0		0	0		22	3,679,973	
30501	ALAT KANTOR	-	13	1,855,604		0	0		0	0		13	1,855,604	
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	8	597,869		0	0		0	0		8	597,869	
30601	ALAT STUDIO	-	1	1,226,500		0	0		0	0		1	1,226,500	
TOTAL				73,286,683,674			11,494,071,352			11,199,570,352			73,681,184,674	

Pontianak, 31 Desember 2023

Pemanggang Jawab UAKPB

Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak



YUNARNELA, S.T., M.M.

197706242006042001

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 JANUARI 2023

Tgl Data : 05/02/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 05/02/24 3:02 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099066 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023			MUTASI			SALDO PER 31 JANUARI 2023		
			BERTAMBAH			BERKURANG					
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	
KODE	URAIAN										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
131111	Tanah		10,130	54,166,769,000	0	0	0	0	10,130	54,166,769,000	
20101	TANAH PERSIL		10,130	54,166,769,000	0	0	0	0	10,130	54,166,769,000	
132111	Peralatan dan Mesin	-	917	5,289,413,966	0	0	0	0	917	5,289,413,966	
30103	ALAT BANTU	-	2	267,663,000	0	0	0	0	2	267,663,000	
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	9	1,230,343,941	0	0	0	0	9	1,230,343,941	
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	4	2,860,000	0	0	0	0	4	2,860,000	
30303	ALAT UKUR	-	1	17,701,652	0	0	0	0	1	17,701,652	
30501	ALAT KANTOR	-	156	467,376,842	0	0	0	0	156	467,376,842	
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	531	1,465,798,575	0	0	0	0	531	1,465,798,575	
30601	ALAT STUDIO	-	48	275,358,820	0	0	0	0	48	275,358,820	
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	8	54,069,100	0	0	0	0	8	54,069,100	
31001	KOMPUTER UNIT	-	95	1,241,458,036	0	0	0	0	95	1,241,458,036	
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	62	246,784,000	0	0	0	0	62	246,784,000	
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	-	1	20,000,000	0	0	0	0	1	20,000,000	
133111	Gedung dan Bangunan		18	13,467,553,000	0	0	0	0	18	13,467,553,000	
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	5	11,880,768,000	0	0	0	0	5	11,880,768,000	
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	13	1,586,785,000	0	0	0	0	13	1,586,785,000	
134112	Irigasi		1	58,656,000	0	0	0	0	1	58,656,000	
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	-	1	58,656,000	0	0	0	0	1	58,656,000	
134113	Jaringan		2	249,417,700	0	0	0	0	2	249,417,700	
50402	JARINGAN LISTRIK	-	1	244,417,700	0	0	0	0	1	244,417,700	
50403	JARINGAN TELEPON	-	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000	
135121	Aset Tetap Lainnya		30	9,839,869	0	0	0	0	30	9,839,869	
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	30	9,839,869	0	0	0	0	30	9,839,869	
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		15	3,114,864	0	0	0	0	15	3,114,864	
30501	ALAT KANTOR	-	13	1,855,604	0	0	0	0	13	1,855,604	
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1	32,760	0	0	0	0	1	32,760	
30601	ALAT STUDIO	-	1	1,226,500	0	0	0	0	1	1,226,500	
TOTAL				73,244,764,399		0	0	0		73,244,764,399	



Pontianak, 31 Desember 2023
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak
YUNIAR NELLY, S.T., M.M.
197406242006042001

LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099066 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 10/01/24 2:14 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_salker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
					KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		161	41,364,166	13	12,974,000	0	0	174	54,328,166
30501	ALAT KANTOR	-	16	2,930,846	0	0	0	0	16	2,930,846
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	121	32,496,320	13	12,974,000	0	0	134	45,470,320
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	15	2,607,000	0	0	0	0	15	2,607,000
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	9	3,320,000	0	0	0	0	9	3,320,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		7	565,109	0	0	0	0	7	565,109
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	7	565,109	0	0	0	0	7	565,109
TOTAL				41,919,275		12,974,000		0		54,893,275

Pontianak, 31 Desember 2023
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak


YUNIAR NELLY, S.T., M.M.
197706242006042001

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099066 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 28/02/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 28/02/24 4:07 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker

AKUN NERACA KELOMPOK BARANG			SAT		SALDO 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED					AKUMULASI PENYUSUTAN		NILAI BUKU	
KODE	URAIAN		SAT		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL		NILAI BUKU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13111	Tanah	-	10,130	54,166,769,000	0	0	0	0	0	0	0	10-5-9	54,166,769,000
20101	TANAH PERSIL	-	10,130	54,166,769,000	0	0	0	0	0	0	0	54,166,769,000	54,166,769,000
13211	Peralatan dan Mesin	-	933	5,469,340,966	(4,360,302,741)	(403,598,870)	0	(4,763,901,611)	0	(4,763,901,611)	0	705,439,355	705,439,355
30103	ALAT BANTU	-	2	267,663,000	(211,587,000)	(37,384,000)	0	(248,971,000)	0	(248,971,000)	0	18,692,000	18,692,000
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	9	1,230,343,941	(1,085,058,227)	(72,642,857)	0	(1,157,701,084)	0	(1,157,701,084)	0	72,642,857	72,642,857
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	0	0	(2,860,000)	2,860,000	0	0	0	0	0	0	0
30303	ALAT UKUR	-	0	0	(17,701,652)	17,701,652	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	-	157	487,376,842	(430,126,842)	(29,500,000)	0	(459,626,842)	0	(459,626,842)	0	27,750,000	27,750,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	546	1,585,258,575	(1,332,253,117)	(57,977,324)	0	(1,390,230,441)	0	(1,390,230,441)	0	195,028,134	195,028,134
30601	ALAT STUDIO	-	48	275,358,820	(125,485,382)	(42,136,564)	0	(167,621,946)	0	(167,621,946)	0	107,736,874	107,736,874
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	8	54,069,100	(51,950,830)	(605,220)	0	(52,556,050)	0	(52,556,050)	0	1,513,050	1,513,050
31001	KOMPUTER UNIT	-	96	1,256,250,036	(866,204,441)	(145,933,030)	0	(1,012,137,471)	0	(1,012,137,471)	0	244,112,565	244,112,565
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	67	313,020,652	(225,075,250)	(49,981,527)	0	(275,056,777)	0	(275,056,777)	0	37,963,875	37,963,875
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	-	0	0	(12,000,000)	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0
13311	Gedung dan Bangunan	-	18	13,877,226,700	(5,328,339,098)	(1,180,603,349)	0	(6,708,942,447)	0	(6,708,942,447)	0	7,168,284,253	7,168,284,253
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	5	12,290,441,700	(5,013,575,129)	(1,087,009,901)	0	(6,100,585,030)	0	(6,100,585,030)	0	6,189,856,670	6,189,856,670
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	13	1,586,785,000	(514,763,969)	(93,593,448)	0	(608,357,417)	0	(608,357,417)	0	978,427,583	978,427,583
134112	Irigasi	-	0	0	(7,332,003)	7,332,003	0	0	0	0	0	0	0
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	-	0	0	(7,332,003)	7,332,003	0	0	0	0	0	0	0
134113	Jaringan	-	0	0	(75,514,578)	75,514,578	0	0	0	0	0	0	0
50402	JARINGAN LISTRIK	-	0	0	(73,889,578)	73,889,578	0	0	0	0	0	0	0
50403	JARINGAN TELEPON	-	0	0	(1,625,000)	1,625,000	0	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	-	30	9,839,869	0	0	0	0	0	0	0	9,839,869	9,839,869
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	30	9,839,869	0	0	0	0	0	0	0	9,839,869	9,839,869
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-	15	3,114,864	(3,114,864)	0	0	(3,114,864)	0	(3,114,864)	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	-	13	1,855,604	(1,855,604)	0	0	(1,855,604)	0	(1,855,604)	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1	32,760	(32,760)	0	0	(32,760)	0	(32,760)	0	0	0
30601	ALAT STUDIO	-	1	1,226,500	(1,226,500)	0	0	(1,226,500)	0	(1,226,500)	0	0	0
JUMLAH			11,126	73,526,291,399	(9,974,603,284)	(1,501,355,638)	0	(11,475,958,922)	0	(11,475,958,922)	0	62,050,332,477	62,050,332,477



LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

UAPB : 005
UAKPB : 099066

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 28/02/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 28/02/24 4:08 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG			SALDO 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED				
KODE	URAIAN	SAT	Kuantitas	Nilai	AKUMULASI PENYUSUTAN		
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
							TOTAL
							9=6+7+8
							10=5-9
132111	Peralatan dan Mesin		174	54,328,166	(32,558,631)	(4,888,030)	0
30501	ALAT KANTOR	-	16	2,930,846	(2,930,846)	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	134	45,470,320	(23,700,785)	(4,888,030)	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	15	2,607,000	(2,607,000)	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	9	3,320,000	(3,320,000)	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		7	565,109	(565,109)	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	7	565,109	(565,109)	0	0
JUMLAH			181	54,893,275	(33,123,740)	(4,888,030)	0
							(38,011,770)
							16,881,505

Pontianak, 31 Desember 2023
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak

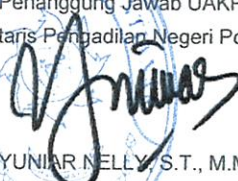
YUNIAR NELLY, S.T., M.M.
197006242006042001

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UAKPB : 099066 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl.Data : 10/01/24 12:00 PM
 Tgl.Cetak : 10/01/24 2:15 PM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	31,066,300
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	12,460,400
131111	Tanah	54,166,769,000
132111	Peralatan dan Mesin	5,469,340,966
133111	Gedung dan Bangunan	13,877,226,700
135121	Aset Tetap Lainnya	9,839,869
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4,576,998,589)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(6,193,752,039)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	3,114,864
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(3,114,864)
J U M L A H		62,795,952,607

Pontianak, 10 Januari 2024
 Penanggung Jawab UAKPB
 Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak

 YUNIAR NELLY, S.T., M.M.
 197706242006042001

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2023(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2023**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099066 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tanggal : 29/02/24 11:40 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	7,418,500
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	7,000,400
131111	Tanah	54,166,769,000
132111	Peralatan dan Mesin	5,289,413,966
133111	Gedung dan Bangunan	13,467,553,000
134112	Irigasi	58,656,000
134113	Jaringan	249,417,700
135121	Aset Tetap Lainnya	9,839,869
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4,360,302,741)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(5,528,339,098)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(7,332,003)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(75,514,578)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3,114,864
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(3,114,864)
J U M L A H		63,284,580,015



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**

Jalan Sultan Abdurrahman No 89, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat, 78116. www.pn-pontianak.go.id, pengadilannegeriptk@gmail.com

**Berita Acara Opname Fisik (Stock Opname) Persediaan
Pengadilan Negeri Pontianak
No: 02/099066/SO/01/2024**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **12** bulan **Januari** tahun **2023** Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

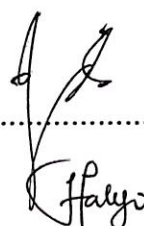
1. Nama : LILY WIDYANTI, SE
NIP. : 197707282006042001
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
2. Nama : LISA ENDAH FATAYANI, A.Md.
NIP. : 197706262022032019
Jabatan : Pengelola Barang Milik Negara
3. Nama : RUSLI
NIP. : -
Jabatan : PPNPN

Menyatakan bahwa telah melakukan **Stock Opname** barang persediaan 099066 Semester 2 Tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam lampiran Berita Acara Opname Fisik (Stock Opname). Adapun total Nilai Barang per 31 Desember 2023 meliputi ;

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| a. Barang Konsumsi | : Rp.29.285.800,- |
| b. Bahan Untuk Pemeliharaan | : <u>Rp.10.952.900,-</u> |
| Total | : Rp.40.238.700,- |

Demikian Berita Acara Persediaan ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Stock Opname :

- | | | |
|-------------------------------|------------------------|--|
| 1. LILY WIDYANTI, SE | NIP.19770728200604200 |
 |
| 2. LISA ENDAH FATAYANI, A.Md. | NIP. 19970626202203201 |
 |
| 3. RUSLI | NIP. - | |



Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang


Yumiar Nelly

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (UAPA)
SEMESTERAN / TAHUNAN TA 2023

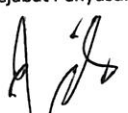
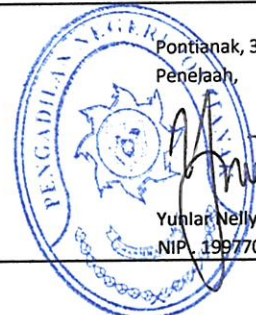
Kode dan Nama K/L : (099066) Pengadilan Negeri Pontianak

KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
		Ada	Tidak	Seharusnya
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok				
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
Laporan Keuangan Tambahan				
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	✓		Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	✓		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)			Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditikan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditikan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		✓	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		✓	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		✓	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		✓	Tidak
	a. Pagu/DIPA		✓	Tidak
	b. Estimasi PNBP		✓	Tidak
	c. Belanja		✓	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		✓	Tidak
	e. Pendapatan		✓	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		✓	Tidak
	g. Kas BLU		✓	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		✓	Tidak
	i. Kas Hibah		✓	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		✓	Tidak

		Ya	Tidak	Seharusnya
	Rekon Internal		✓	Tidak
1	Terdapat Selisih Rekon Internal			
		Ada	Tidak	Seharusnya
	Daftar MONSAKTI			
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		✓	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		✓	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		✓	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		✓	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		✓	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		✓	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		✓	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		✓	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		✓	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	✓		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	✓		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	✓		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	✓		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		✓	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		✓	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		✓	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		✓	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		✓	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		✓	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		✓	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		✓	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		✓	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		✓	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		✓	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		✓	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		✓	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		✓	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		✓	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		✓	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		✓	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak

Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial			Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI			Tidak
Hibah Langsung		Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		✓	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.			Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal				
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		✓	Tidak
Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		✓	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akruel?			Ya
Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		✓	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?			Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK			
Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		✓	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
Pengecekan Pos-pos Neraca		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	✓		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	✓		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	✓		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	✓		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	✓		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		✓	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	✓		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		✓	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
Pengecekan Pos-pos LO		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		✓	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-		✓	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		✓	Tidak

4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	✓		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		✓	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	✓		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
Pengecekan Pos-pos LPE		Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	✓		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		✓	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		✓	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	✓		Ya
Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST				
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	✓		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
Pengecekan Pos-pos LRA/B/P		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		✓	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		✓	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		✓	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		✓	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	✓		Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	✓		Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		✓	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		✓	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		✓	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		✓	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		✓	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		✓	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	✓		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	✓		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	✓		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	✓		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	✓		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	✓		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	✓		Ya
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		✓	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		✓	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		✓	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	✓		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua	✓		Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		✓	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	✓		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	✓		Ya/Tidak

5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan AkruaI	✓		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
LPSAL BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaI BLU?			Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			Ya
LAK BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaI BLU?			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				
<i>"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk</i>				
Mengetahui Pejabat Penyusun LKKL,  Lily Widyanti, S.E NIP.197707282006042001		Pontianak, 30 Januari 2024 Penelaah,  Yunlar Nelly, S.T.M.M NIP. 1997706242006042001 		

BUKU KAS UMUM

Periode Desember 2023

Departemen/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Propinsi/Kabupaten/Kota : (13.51) KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK
Satuan Kerja : (099066) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
Tanggal, No SP DIPA : 30 November 2022, DIPA-005.01.2.099066/2023
Jumlah Pagu Per Kelompok Belanja : (53) Rp. 218.200.000,00
(52) Rp. 2.317.254.000,00

Revisi ke :1 : 14 Februari 2023, DIPA-005.01.2.099066/2023
Revisi ke :2 : 18 April 2023, DIPA-005.01.2.099066/2023
Revisi ke :3 : 17 Juli 2023, DIPA-005.01.2.099066/2023
Revisi ke :4 : 01 September 2023, DIPA-005.01.2.099066/2023
Revisi ke :5 : 29 September 2023, DIPA-005.01.2.099066/2023
Revisi ke :6 : 16 Oktober 2023, DIPA-005.01.2.099066/2023
Revisi ke :7 : 01 Desember 2023, DIPA-005.01.2.099066/2023
Revisi ke :8 : 14 Desember 2023, DIPA-005.01.2.099066/2023
Revisi ke :9 : 22 Desember 2023, DIPA-005.01.2.099066/2023
Tahun Anggaran : 2023
KPPN : (042) Pontianak

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



KOTA PONTIANAK, 29 Desember 2023

Bendahara Pengeluaran,

RATNA MARMAMAH HARAHAP, SH
Penata Muda Tk.I (III/b) 198703022012122001

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Jumat tanggal 29 bulan Desember tahun 2023, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 653240990661000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00039/DRPP/099066/2023

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara		
1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	0
2 Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3 Saldo BP BPP	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :		
1 Saldo BP UP	Rp.	0
2 Saldo BP TUP	Rp.	0
3 Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4 Saldo Pajak	Rp.	0
5 Saldo Hibah	Rp.	0
6 Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
7 Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	0

C. Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0
------------------------------	-----	---

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara		
1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0
B. Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1 a. Saldo UP	Rp.	0
b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	0
2 a. Saldo TUP	Rp.	0
b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0
3 Saldo Lainnya	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0
B. Pembukuan menurut UAKPA		
1 Kas UP di Bendahara	Rp.	0
2 Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3 Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0
4 Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	0
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)	Rp.	0

IV. Penjelasan atas selisih

- A. Selisih Kas (II.B)
- B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

RATNA MARHAMAH HARAHAP, SH
NIP 198703022012122001



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2023

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl, No. SP : 30 November 2022 , DIPA-005.01.2.099066/2023

Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (13.51) KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK KPPN

: (042) Pontianak

Satuan Kerja : (099066) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00039/DRPP/099066/2023

1	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	60.000.000,00	547.293.287,00	607.293.287,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	60.000.000,00	547.293.287,00	607.293.287,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	60.000.000,00	263.872.057,00	323.872.057,00	0,00
	1. BP UP*)	60.000.000,00	35.362.644,00	95.362.644,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	191.953.200,00	191.953.200,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	16.936.213,00	16.936.213,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	19.620.000,00	19.620.000,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00 (terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

- 1.
- 2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

Yuniar Nelly, ST,MM
NIP. 197706242006042001

KOTA PONTIANAK, Desember 2023
Bendahara Pengeluaran

RATNA MARHAMAH HARAHAP,SH
Penata Muda Tk.I (III/b) 198703022012122001
Desetak pada tanggal 09 Januari 2024

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

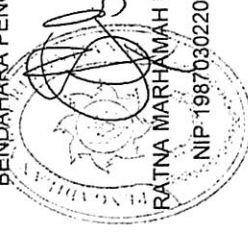
BULAN : DESEMBER 2023

Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (13.51) KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK
 Satuan Kerja : (099066) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK09906600-
 No Rekening : 653240990661000
 Nama Rekening : BPG 042 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
 Nama Bank : KC Veteran
 Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2023			59.568.300,00
05-12-2023	FPK-PENG-D090zdkoiyY87jr	[DARI TUNAI] PU Bank	0,00	59.568.300,00	0,00
06-12-2023	FPK-PENG-wPqw3gBdOINGJ9K	TUP PN PTK 2023	191.953.200,00	0,00	191.953.200,00
08-12-2023	FPK-PENG-ZfcMU7n9IzaRefS	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang	31.899.730,00	0,00	223.852.930,00
14-12-2023	FPK-PENG-qU1vWKuD0A0bbNWD	Penggantian Uang Persediaan KKP	1.882.350,00	0,00	225.735.280,00
14-12-2023	FPK-PENG-82oKuGY35cwSiyf	[DARI TUNAI] PU Bank	0,00	191.953.200,00	33.782.080,00
14-12-2023	FPK-PENG-Co52zO6ai9SuY24	[DARI TUNAI] PU Bank	0,00	31.899.730,00	1.882.350,00
14-12-2023	FPK-PENG-4NPKTJBjM8pU2Z9	Pembayaran KKP	0,00	1.882.350,00	0,00
18-12-2023	FPK-PENG-	Transport Hakim	19.620.000,00	0,00	19.620.000,00

1	2	3	4	5	6
	wTmoKhfjQ0kCjQB				
19-12-2023	FPK-PENG- qhQDdHB2PEbTtQO	Penggantian Uang Persediaan KKP	1.580.564,00	0,00	21.200.564,00
19-12-2023	FPK-PENG- hmnN2znEqIt9pDV	Transport Hakim	0,00	19.620.000,00	1.580.564,00
29-12-2023	FPK-PENG- 6qna5WppgZmysbC	Pembayaran KKP	0,00	1.580.564,00	0,00
29-12-2023	FPK-PENG- 78ka1Mw2sCLsznV	SP2D TUP Nihil	0,00	0,00	0,00
29-12-2023	FPK-PENG- EBI9pTgN1a4o6nq	SP2D TUP Nihil	0,00	0,00	0,00
29-12-2023	FPK-PENG- 0oemFMHTWtgyKZW	SP2D GU Nihil	0,00	0,00	0,00
Jumlah			246.935.844,00	306.504.144,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



RATNA MARHAWAH HARAHAP, SH
NIP 198703022012122001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

***DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN**

SATKER 099066

BULAN : DESEMBER 2023

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	65324099066100 0	BPG 042 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	KC Veteran	20	S- 2732/WPB.12/KP. 06/2020	16-10-2020	2023-12-29	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN

RATNA MARHAMAH HARAHAP, SH
NIP. 198703022012122001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.
** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)
BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK (099066)
Rekening Induk : RKK BUA MA OPS (032901xxxxx304)
Virtual Account : 653240990661000 | BPG 042 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
Periode : 01-12-2023 s/d 31-12-2023

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-05	09:09:00	22179991	BPG 042 PENGADILAN NEGERI PTK	59.568.300,00	59.568.300,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2023-12-06	10:08:21	22354440	Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupiah Mumi Salker Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2023 untuk230421301024938000001	0,00	0,00	191.953.200,00	191.953.200,00	SPAN	
2023-12-08	12:51:12	22773066	Pengantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 230421301025464000001	191.953.200,00	0,00	31.899.730,00	223.852.930,00	SPAN	
2023-12-14	09:15:55	23409727	Pengantian Uang Persediaan KKP Untuk Keperluan Belanja Barang 230421301026451000001	223.852.930,00	0,00	1.882.350,00	225.735.280,00	SPAN	
2023-12-14	14:11:53	23467478	REGULAR_65324_0990661000	225.735.280,00	223.852.930,00	0,00	1.882.350,00	TELLER_CARD	
2023-12-14	14:26:30	23470256	Bayar Kartu Kredit BRI BRI BRI NON FEE534790300497104	1.882.350,00	1.882.350,00	0,00	0,00	ATM	
2023-12-18	15:07:49	24043198	653240990661000	0,00	0,00	19.620.000,00	19.620.000,00	BRIVA	
2023-12-19	10:20:52	24214779	Pengantian Uang Persediaan KKP Untuk Keperluan Belanja Barang 230421301026758000001	19.620.000,00	0,00	1.580.564,00	21.200.564,00	SPAN	
2023-12-19	14:26:33	24276703	REGULAR_65324_0990661000	21.200.564,00	19.620.000,00	0,00	1.580.564,00	TELLER_CARD	
2023-12-29	06:27:41	27428149	Bayar Kartu Kredit BRI BRI BRI NON FEE534790300497104	1.580.564,00	1.580.564,00	0,00	0,00	ATM	
Total Mulasi				306.504.144,00	246.935.844,00				
Saldo Akhir							0,00		

Rincian Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran

BA : (005) Mahkamah Agung
Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
Wilayah : (1300) Kalimantan Barat
Satuan Kerja : (099066) Pengadilaa Negeri Pontianak

No	Nama Wilayah	Kode Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2023				KET
					Tunai	Saldo Bank		Total	
						Saldo	Bank dan No. Rek		
1	KALIMANTAN BARAT	1300	099066	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	Rp -	Rp -	BRI 653240990661000	Rp -	NIHIL
TOTAL					Rp -				

Pontianak, 2 Januari 2024
Kuasa Pengguna Anggaran
YUNIAR NELLY S.T.M.M.
NIP. 19770624 200604 2 001

Rincian Nilai Kas di Bendahara Penerimaan

K/L
Eselon I
Wilayah
Satuan Kerja

: (005) Mahkamah Agung
: (01) Badan Urusan Administrasi
: (1300) Kalimantan Barat
: (099066) Pengadilan Negeri Pontianak

No	Nama Wilayah	Kode Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2023				KET
					Tunai	Saldo Bank		Total	
						Saldo	Bank dan No. Rek		
1	KALIMANTAN BARAT	1300	099239	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	Rp -	Rp -	-	Rp -	Tidak terdapat Rekening Bendahara Penerimaan
TOTAL									Rp -

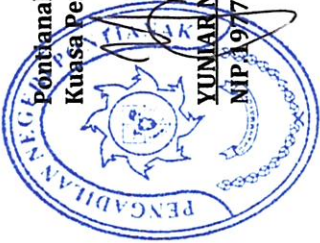
Pontianak, 2 Januari 2024
Kuasa Pengguna Anggaran
YUNARNELLY S.T.M.M.
NIP. 19770624 200604 2 001



LAPORAN REKENING LAINNYA PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
PERIODE 1 JANUARI 2022 SD 31 DESEMBER 2023

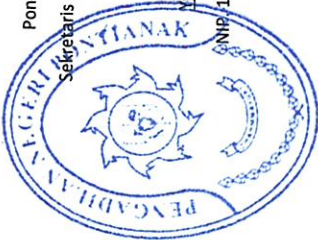
Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Pontianak (099066)

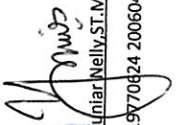
PERIODE	URAIAN	KEADAAN KEUANGAN						KET
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR	SALDO AKHIR DI BANK	SALDO AKHIR DI BRANKAS	
JANUARI SD DESEMBER 2023		Rp	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	Tidak terdapat Rekening Lainnya
		Rp	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	
		Rp	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	
JUMLAH		Rp	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	- Rp	

Pontianak, 2 Januari 2024
Kuasa Pengguna Anggaran

YUNIAR NELLY S.T.M.M.
NIP.19770624 200604 2 001

DAFTAR MONITORING PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
 PERIODE 31 DESEMBER 2023

NO	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS REK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	TANGGAL PENUTUPAN	ALASAN PENUTUPAN
1	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK					NIHIL			



Pontianak, 2 Januari 2024
 Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak

 Nuniar Nelly, ST.MM
 NIP. 19770424 200604 2 001

KARTU RINCIAN BELANJA BARANG DIBAYAR DI MUKA (SEWA RUMAH DINAS)
per 31 Desember 2023

Lampiran X

BA : (005) Mahkamah Agung
Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
Wilayah : (1300) Kalimantan Barat
Satuan Kerja : (099066) Pengadilan Negeri Pontianak

No	Nama Pegawai	Nilai SP2D	Lama Angsuran (bulan)	Angsuran per Bulan	TMT	Jatuh Tempo	Jumlah Angsuran (bulan)	Total Angsuran (rupiah)	Sisa Angsuran (bulan)	Sisa Angsuran (rupiah)	Rincian Angsuran per Akun (rupiah)	Jumlah Saldo Akhir
						NIHIL					522141	



KARTU RINCIAN NILAI PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
per 31 Desember 2023

BA
Eselon I
Wilayah
Satuan Kerja

: (005) Mahkamah Agung
 : (01) Badan Urusan Administrasi
 : (1300) Kalimantan Barat
 : (099066) Pengadilan Negeri Pontianak

No	Uraian	Nilai SSBP	Jangka Waktu (Bulan)	TMT	Jatuh Tempo	Daluwarsa		Pendapatan Diterima di Muka
						s.d 31 Desember 2023	Tahun Berjalan 2024	
				NIHIL				

Pontianak, Januari 2024
 Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak



YUNYARNELLY, S.T., M.M.
 NIP. 19770624 200604 2 001

KARTU RINCIAN NILAI UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR)
per 31 Desember 2023

Lampiran XI

BA : (005) Mahkamah Agung
Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
Wilayah : (1300) Kalimantan Barat
Satuan Kerja : (099066) Pengadilan Negeri Pontianak

No	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	SATKER	TA	AKUN	URAIAN	BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	DOKUMEN SUMBER	KETERANGAN
1	1300	Kalimantan Barat	099066	Pengadilan Negeri Pontianak	2023	511129	Belanja Uang Makan PNS	779,000	SPM NO: 00005 TANGGAL 09-01-2024	Susulan uang makan bulan Desember 2023
3	1300	Kalimantan Barat	099066	Pengadilan Negeri Pontianak	2023	511129	Belanja Uang Makan PNS	2,302,000	SPM NO: 00008 TANGGAL 10-01-2024	Susulan uang makan bulan Desember 2023
4	1300	Kalimantan Barat	099066	Pengadilan Negeri Pontianak	2023	522112	Belanja Langganan Telepon	189,921	SPM NO: 00010 TANGGAL 11-01-2024	Beban Langganan Telepon Bulan Desember 2023
5	1300	Kalimantan Barat	099066	Pengadilan Negeri Pontianak	2023	522113	Belanja Langganan Air	1,678,000	SPM NO: 00009 TANGGAL 11-01-2024	Beban Langganan Air Bulan Desember 2023
6	1300	Kalimantan Barat	099066	Pengadilan Negeri Pontianak	2023	52111	Belanja Keperluan Pekantoran	2,658,450	SPM NO: 00011 TANGGAL 11-01-2024	Beban Langganan Internet Bulan Desember 2023
JUMLAH TOTAL								7,607,371		

Pontianak, Januari 2024
Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak

Yuniar Nelly, S.T., M.M.
NIP. 197706242006042001

